

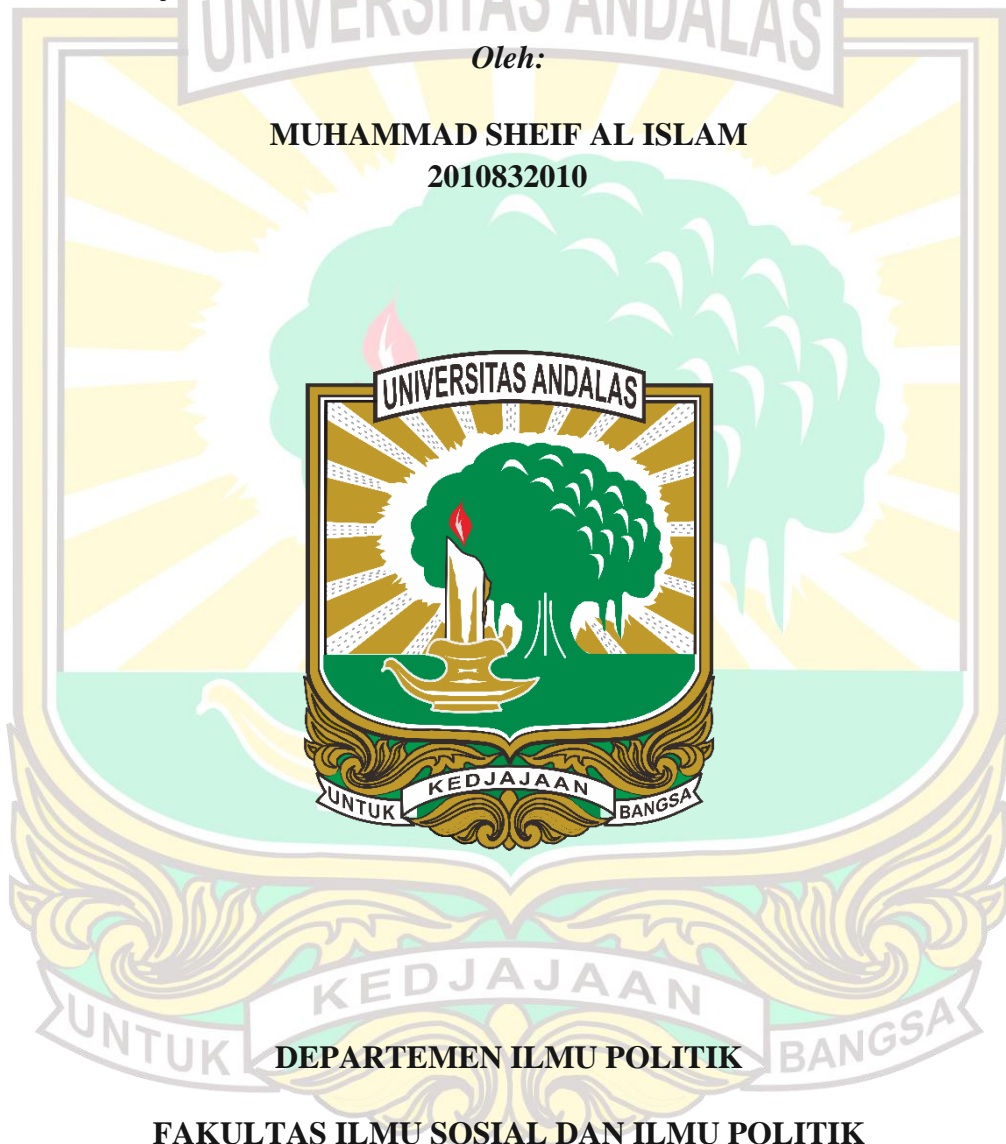
**KEGAGALAN KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA
PANTAI PADANG KE PASAR KULINER PANTAI PADANG
TAHUN 2025**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh:

**MUHAMMAD SHEIF AL ISLAM
2010832010**



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

**KEGAGALAN KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA
PANTAI PADANG KE PASAR KULINER PANTAI PADANG
TAHUN 2025**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh:

**Muhammad Sheif Al Islam
2010832010**



Pembimbing:

**Dr. Zulfadli, M.Si
Andhik Beni Saputra, MA**

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

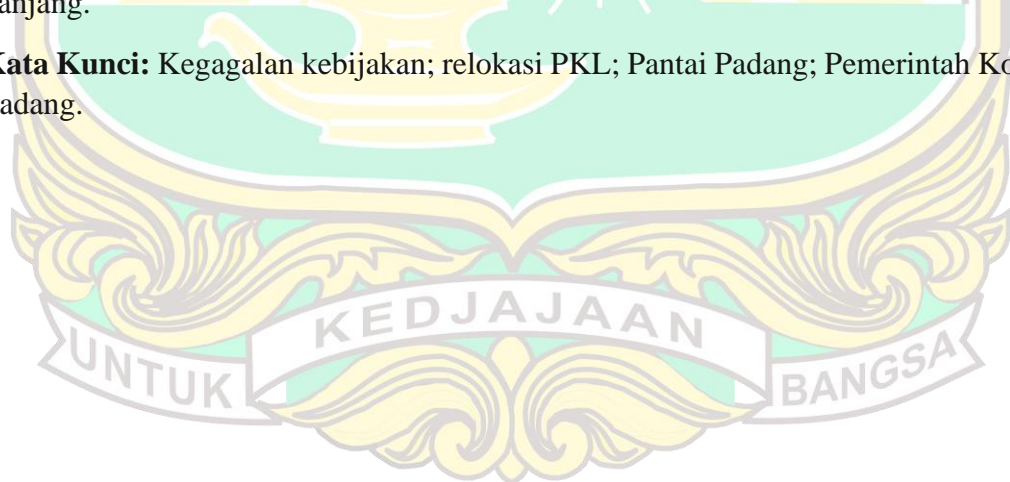
PADANG

2025

ABSTRAK

Kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dari kawasan bibir Pantai Padang ke Pasar Kuliner Pantai Padang merupakan upaya Pemerintah Kota Padang dalam menata ruang publik dan kawasan wisata. Namun, dalam praktiknya kebijakan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan dan belum mencapai tujuan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kegagalan kebijakan relokasi PKL ke Pasar Kuliner Pantai Padang agar kesalahan yang terjadi tidak terulang kembali dimasa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan kerangka teori kegagalan kebijakan Bob Hudson, David Hunter, dan Stephen Peckham yang meliputi indikator 1) ekspektasi yang terlalu berlebihan, 2) implementasi dalam pemerintahan yang tersebar, 3) perancangan kebijakan kolaboratif yang tidak memadai, dan 4) ketidakpastian siklus politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan kunci, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan kebijakan relokasi disebabkan oleh lemahnya perumusan kebijakan sejak awal yang tidak didukung oleh desain dan data empirik yang memadai, koordinasi antar instansi yang kaku, minimnya partisipasi kelompok sasaran dan unsur pentahelix, serta ketidakberlanjutan kebijakan akibat pergantian kepemimpinan daerah. Temuan ini menyimpulkan bahwa kebijakan relokasi PKL tidak dapat dipahami sebagai persoalan teknis semata, melainkan sebagai persoalan tata kelola kebijakan publik yang belum berbasis bukti, kolaboratif, dan berorientasi jangka panjang.

Kata Kunci: Kegagalan kebijakan; relokasi PKL; Pantai Padang; Pemerintah Kota Padang.



ABSTRACT

The relocation policy of street vendors (Pedagang Kaki Lima/PKL) from the coastal area of Padang Beach to the Pantai Padang Culinary Market represents an effort by the Padang City Government to regulate public space and tourism areas. However, in practice, this policy has generated various problems and has not achieved its intended objectives. This study aims to analyze the factors contributing to the failure of the PKL relocation policy to the Pantai Padang Culinary Market in order to prevent similar policy mistakes in the future. The study employs the policy failure framework proposed by Bob Hudson, David Hunter, and Stephen Peckham, which consists of 1) overly optimistic expectations, 2) implementation within dispersed governance, 3) inadequate collaborative policy design, and 4) political cycle uncertainty. This research adopts a qualitative approach with a case study design. Data were collected through observation, in-depth interviews with key informants, and document analysis. The findings indicate that the failure of the relocation policy was caused by weak policy formulation that lacked clear design and empirical data, rigid inter-agency coordination, limited participation of target groups and pentahelix actors, and the lack of policy sustainability due to changes in local political leadership. These findings suggest that the relocation policy should not be understood merely as a technical issue, but rather as a problem of public policy governance that has not yet been evidence-based, collaborative, and oriented toward long-term sustainability.

Keywords: *city government of Padang; Policy failure; Padang Beach; street vendor relocation.*

